

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebijakan luar negeri berarti studi tentang kebijakan luar negeri negara pembanding dengan beberapa partai politik untuk menunjukkan sistem politik. Sistem birokrasi yang berbeda memiliki keputusan yang berbeda (termasuk politik luar negeri) dirumuskan dan dilaksanakan. Sementara itu Di sebagian besar negara maju, kebijakan nasional biasanya disiapkan dan beroperasi melalui prosedur birokrasi yang ada yang merupakan pembuat keputusan kunci, sebagian besar didominasi oleh negara-negara berkembang. Faktor terdepan yang sering menjadi pemain paling penting dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri negara-negara berkembang adalah faktor penentu. Demikian dalam menjelaskan dan mengidentifikasi politik luar negeri peserta yang terlibat dalam pembentukan (pengambilan keputusan), struktur internal negara harus diperhitungkan. Berdasarkan penelitian ini dapat diasumsikan bahwa perubahan dalam sistem politik negara yang terjadi setiap saat, dapat menyebabkan negara berubah kebijakan luar negerinya.

Pemilihan presiden AS selalu menjadi pusat perhatian dunia karena AS merupakan negara adidaya yang berperan penting dalam hubungan internasional. Setiap perubahan kepemimpinan Amerika, baik di partai yang sama atau yang lain, selalu diikuti dengan perubahan besar dalam politik luar negeri. Selama masa

pemilihan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengeluarkan beberapa pernyataan dan janji kampanye diantaranya adalah Meningkatkan hubungan dengan sekutu AS, Memperkuat perjanjian nuklir dengan Iran, Menghentikan dukungan AS terhadap perang di Yaman, Memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia, Menjaga keamanan siber dan Mengembalikan AS ke perjanjian iklim Paris.<sup>1</sup> Dari banyaknya pernyataan kampanye oleh Joe Biden salah satunya adalah mengembalikan AS ke perjanjian iklim paris, pada 1 Juni 2017. Mantan Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa dia bermaksud menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris. Deklarasi tersebut dikecam oleh banyak negara penandatangan di seluruh dunia, serta oleh beberapa organisasi internasional dan sipil.<sup>2</sup> Akhirnya, proses penarikan AS berakhir pada 4 November 2020, setelah menunggu selama tiga tahun sejak niat diumumkan. Meskipun demikian, banyak pihak di Amerika Serikat dan luar negeri tetap berkomitmen untuk memenuhi tujuan pengurangan gas rumah kaca yang disepakati dalam Perjanjian Iklim Paris<sup>3</sup>.

Amerika serikat sendiri merupakan salah satu negara yang di nilai aktif melakukan kampanye dan menyuarakan mengenai pentingnya pemeliharaan *Environment* yang pada implikasinya Amerika serikat membuat beberapa Langkah dalam memelihara lingkungan, seperti di buatnya *Clean Air Act*, *Clean Water Act*

---

<sup>1</sup> "Joe Biden's Campaign Promises on Climate Change, Explained" - Vox: <https://www.vox.com/2020/11/2/21539240/joe-biden-climate-change-policy-explained> (14/04/2023 09:10)

<sup>2</sup> World Resources Institute. (2017). What Does Trump's Paris Agreement Withdrawal Mean? <https://www.wri.org/insights/what-does-trumps-paris-agreement-withdrawal-mean> (14/4/2023 9:23)

<sup>3</sup> The New York Times. (2017). U.S. Will Withdraw From Paris Climate Agreement. <https://www.nytimes.com/2017/06/01/climate/trump-paris-climate-agreement.html> (14/4/2023 09:25)

serta pengadopsian beberapa *Policy* lainnya yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan yang pada akhirnya memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan. Sebagai contoh yakni implementasi dari *Clean Air Act* dan *Clean Water Act* yang memberikan dampak yang signifikan seperti meningkatnya kualitas Air secara signifikan yang membuat banyak air di Amerika banyak yang pada akhirnya mengalami peningkatan terhadap kualitasnya setelah penggunaan undang-undang ini dan memberikan dampak yang sangat baik terhadap kualitas udara di Amerika<sup>4</sup>

Setelah penarikan Donald Trump dari Perjanjian Iklim Paris, banyak negara di dunia terus menunjukkan dukungan untuk perjanjian tersebut, ketika Joe Biden terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2020, pada hari pertamanya menjabat tanggal 20 Januari 2021, dia memutuskan untuk membawa Amerika Serikat kembali ke Perjanjian Iklim Paris.<sup>5</sup> Perjanjian Iklim Paris adalah perjanjian internasional yang disepakati pada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ke-21 di Paris, Prancis pada bulan Desember 2015. Perjanjian tersebut bertujuan untuk memerangi perubahan iklim global dengan membatasi peningkatan rata-rata global, suhu di bawah 2 derajat. Di atas tingkat pra-industri pada abad ke-19 dan berupaya membatasi kenaikan suhu rata-rata global hingga 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan tingkat pra-industri. Perjanjian ini mensyaratkan negara-negara penandatanganan untuk mengembangkan dan menyerahkan target nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan

---

<sup>4</sup> Dudley, S. (2012). *Land Mark Legislation : Clean Air and Clean Water Acts*.hlm 69-96

<sup>5</sup> BBC News. (2021). Climate change: Biden 'to sign 15 executive orders on day one'. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55757459> (14/4/2023 9:26)

berkomitmen untuk pengurangan emisi gas rumah kaca secara progresif. Selain itu, perjanjian ini meminta negara-negara untuk memperkuat kapasitas adaptasi mereka dan meningkatkan kerja sama internasional untuk memerangi perubahan iklim.<sup>6</sup>

Perjanjian iklim Paris telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, yang terbentuk setelah penarikan sebelumnya di bawah pemerintahan Donald Trump. Kesepakatan tersebut dipandang sebagai tonggak penting dalam upaya global memerangi perubahan iklim dan melestarikan kelangsungan hidup planet ini. Selama kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2020, Joe Biden berjanji untuk mengembalikan Amerika Serikat ke Perjanjian Iklim Paris setelah ditarik oleh mantan Presiden Donald Trump. Biden mengkritik tindakan Trump yang menarik AS dari perjanjian tersebut sebagai "pembuangan global" dan menegaskan bahwa AS harus memimpin dalam upaya memerangi perubahan iklim<sup>7</sup>. Dalam situs kampanyenya, Biden menyatakan bahwa ia akan memperkuat target pengurangan emisi gas rumah kaca Amerika Serikat hingga setidaknya 50% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat tahun 2005. Biden juga berjanji untuk memperkuat investasi dalam energi terbarukan, mengembangkan infrastruktur hijau, dan menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor energi bersih<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Kusumawati, D., & Syarief, S. (2019). *Analisis kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia menuju target Perjanjian Iklim Paris 2030*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 7(2), 433-443

<sup>7</sup> CNN. (2021, April 22). Joe Biden's Earth Day climate summit: Live updates. Retrieved from <https://www.cnn.com/politics/live-news/biden-earth-day-climate-summit-04-22-21/index.html> (14/4/2023 9:58)

<sup>8</sup> Biden, J. (2020, September 14). The Biden Plan to Build a Modern, Sustainable Infrastructure and an Equitable Clean Energy Future. Retrieved from <https://joebiden.com/clean-energy/> (14/4/2023 9:59)

Biden menekankan bahwa upaya memerangi perubahan iklim adalah tantangan global yang membutuhkan kerja sama internasional, dan bahwa Amerika Serikat harus kembali berperan sebagai pemimpin dalam upaya tersebut. Dukungan Biden terhadap Perjanjian Iklim Paris dan komitmen kuatnya untuk memerangi perubahan iklim telah menjadi salah satu fokus utama dari kampanyenya, dan kini menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahannya sebagai Presiden AS. Pemerintahan Biden telah mengambil sejumlah langkah untuk mempercepat upaya mitigasi perubahan iklim, termasuk menetapkan tujuan yang lebih ambisius untuk mengurangi gas rumah kaca, memperkuat peraturan lingkungan, dan mengalokasikan dana untuk berinvestasi dalam energi terbarukan dan infrastruktur berkelanjutan.<sup>9</sup> Sebagian besar masyarakat internasional telah menyambut baik sikap Joe Biden terhadap perubahan iklim dan keputusannya untuk mengembalikan Amerika Serikat ke dalam Perjanjian Iklim Paris. Banyak yang percaya bahwa kepemimpinan Amerika Serikat dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim sangat penting, dan kembalinya negara tersebut ke dalam perjanjian tersebut akan memberikan dorongan yang kuat bagi negara-negara lain untuk mengambil tindakan yang lebih kuat. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi AS dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan perjanjian ini. Beberapa negara yang menandatangani perjanjian ini mungkin kurang percaya pada komitmen AS setelah pengalaman penarikan diri AS pada masa pemerintahan Trump. Hal tersebut yang

---

<sup>9</sup> The White House. (2021). The Paris Agreement. <https://www.whitehouse.gov/climate-change/the-paris-agreement/> (14/4/2023 10:07)

menarik perhatian penulis untuk menganalisa perubahan kebijakan Joe Biden terhadap Perjanjian Iklim Paris dalam hubungan Internasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni ” *Mengapa Amerika Serikat meratifikasi kembali perjanjian Iklim Paris pada masa pemerintahan Joe Biden ?* ”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan pada penelitian ini adalah Untuk menganalisa perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait perjanjian iklim Paris setelah terpilihnya Joe Biden sebagai presiden.

### **3.1.1 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1.1 Manfaat Akademis**

Penulis berharap Penelitian ini memiliki manfaat akademik yang signifikan karena berkontribusi pada literatur ilmiah tentang hubungan internasional, kebijakan luar negeri, dan perubahan iklim. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang peran Amerika Serikat dalam melawan perubahan iklim dan implikasinya terhadap hubungan internasional. Ini dapat membantu publik dan cendekiawan lebih memahami posisi dan kebijakan AS dalam masalah global ini. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait perubahan kebijakan luar negeri AS.

### **1.3.1.2 Manfaat Praktis**

Penulis berharap Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yakni penelitian ini dapat membantu merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam memerangi perubahan iklim di seluruh dunia. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat secara praktis bagi para pihak yang melakukan kerjasama internasional, termasuk negara-negara lain yang terlibat dalam perang melawan perubahan iklim dan lembaga-lembaga internasional.

## **1.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu dan dijadikan review untuk penelitian yang ditulis oleh peneliti. Peneliti membagi dua penelitian terdahulu yakni pada saat AS melakukan penarikan diri dari perjanjian iklim paris dan saat AS kembali bergabung ke dalam perjanjian iklim paris.

### **1.4.1 AS melakukan penarikan diri dari perjanjian Iklim Paris**

**Penelitian pertama** adalah jurnal yang disusun oleh **Mush'ab Al Ma'ruf, Mahendra Putra Kurnia dan Syukri Hidayatullah** yang berjudul **Tindakan Amerika Serikat Dalam Menarik Diri Dari Paris Agreement Dalam Kerangka Hukum Internasional**, Penelitian ini dilatar belakangi oleh mundurnya Amerika Serikat dari Perjanjian Paris menurut Amerika Serikat perjanjian tersebut adalah perjanjian yang melemahkan ekonominya. Kegiatan ini menimbulkan masalah

bagi Amerika Serikat berdasarkan Pasal 28 Perjanjian Paris tidak bisa keluar sebelum tahun 2020. Dalam hal ini, diperlukan kejelasan hukum menghubungkan negara-negara dalam perlindungan iklim global. Penarikan Amerika dari Perjanjian Paris tersebut tentu menjadi masalah bagi negara-negara anggotanya. Dalam hal itu Perjanjian Paris berlanjut sebagaimana mestinya karena AS mundur melalui mekanisme Perjanjian Paris saat ini, namun Amerika Serikat akan terus berpartisipasi dalam manajemen perubahan iklim karena tidak tercakup dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Kemudian untuk kampanye dan perdagangan batu bara AS harus mengimbangi jalan keluar kewajiban pihak kontraktor untuk negara maju sesuai dengan Perjanjian Paris.<sup>10</sup>

**Penelitian kedua** adalah jurnal yang disusun oleh **Henni Wahyuni** yang berjudul **Keluarnya Amerika Serikat Dari Kesepakatan Paris 2015**, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan Amerika menurutnya presiden baru Donald Trump keluar dari kesepakatan Paris. Konsep yang digunakan untuk tampil analisis dalam penelitian ini adalah kepentingan nasional dan rezim internasional. Analisis data teknik yang digunakan adalah analisis kualitatif. Keluarnya Amerika dari kesepakatan itu adalah bagian dari Kampanye Trump, dengan pertimbangan kepentingan nasional AS, mengenai kepentingan ekonomi dan politik. Presiden sendiri berpendapat bahwa tinggal di Paris Kesepakatan hanya akan membawa AS pada kehancurannya sendiri, dengan kehilangan daya saingnya didunia. Kepentingan ekonomi dan kepentingan politik internal dan eksternal memainkan

---

<sup>10</sup> Mush'ab Al Ma'ruf, Mahendra Putra Kurnia, & Syukri Hidayatullah. (2022). *Tindakan Amerika Serikat Dalam Menarik Diri Dari Paris Agreement Dalam Kerangka Hukum Internasional*. *Risalah Hukum*, 16, 115–135. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.158> (14/4/2023 11:32)



peran utama berperan dalam pengambilan keputusan ini. Meskipun orang Amerika sendiri sangat berbeda pendapat dan memilih untuk tetap di Paris Accord dengan melakukan apa pun yang mereka bisa untuk membantu memperlambat perubahan iklim.<sup>11</sup>

**Penelitian Ketiga** jurnal yang disusun oleh **Firdaus Charisma Budiman** yang berjudul **Analisis Keluarnya Negara Amerika Serikat Dari Perjanjian Paris Ditengah Ketidak Pastian Hasil Pemilihan Umum Amerika Tahun 2020**, didalam penelitian ini membahas Kerja sama internasional untuk mengatasi masalah ini. Perjanjian Paris adalah solusi untuk masalah perubahan iklim global. Amerika adalah salah satu penggagas Perjanjian Paris. Sayangnya, Amerika Serikat memutuskan untuk pergi setelah shift dan menarik diri dari kontrak untuk presiden baru melalui pemilihan parlemen. Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian tersebut oleh Presiden terpilih Donald Trump. Tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis dan menjelaskan alasan keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari Perjanjian Paris dan dampaknya bagi dunia jika AS menarik diri dari Perjanjian Paris.<sup>12</sup>

Ketiga penelitian diatas membahas bagaimana kondisi AS setelah menarik diri dari perjanjian Iklim Paris sehingga memudahkan peneliti menganalisa tindakan dan kondisi setelah penarikan diri AS dari perjanjian Iklim Paris.

---

<sup>11</sup> Wahyuni, H. (2018). *Keluarnya Amerika Serikat Dari Kesepakatan Paris 2015*. EJournal Ilmu Hubungan Internasional, 6(4), 1787–1806. [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/11/26.1102045175 - Henni Wahyuni \(11-14-18-03-49-03\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/11/26.1102045175-Henni%20Wahyuni%20(11-14-18-03-49-03).pdf) (14/4/2023 11:40)

<sup>12</sup> Firdaus Charisma Budiman (2022) *PERJANJIAN PARIS DITENGAH KETIDAK PASTIAN HASIL PEMILIHAN UMUM AMERIKA TAHUN 2020* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

#### 1.4.2 AS kembali bergabung kedalam Perjanjian Iklim Paris

**Penelitian pertama** jurnal yang disusun oleh *PBL Netherlands Environmental Assessment Agency* yang berjudul *The US Rejoining the Paris Agreement: Economic and Environmental Implications*, penelitian ini mengatakan bahwa kembalinya Amerika Serikat ke dalam Perjanjian Iklim Paris dapat membawa dampak positif pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim, dan dapat mempercepat transisi ke ekonomi rendah karbon. Namun, diperlukan upaya yang kuat dan kerja sama internasional yang erat untuk mencapai tujuan perjanjian tersebut dan mengatasi tantangan dalam implementasinya.<sup>13</sup>

**Penelitian kedua** jurnal penelitian oleh *German Institute for International and Security Affairs* yang berjudul *The Re-entry of the United States into the Paris Agreement: Opportunities for Climate Diplomacy and Leadership*, menyatakan bahwa kembalinya Amerika Serikat ke dalam Perjanjian Iklim Paris dapat membuka peluang bagi diplomasi dan kepemimpinan dalam upaya mengatasi perubahan iklim secara global. Dengan memperkuat komitmen dan aksi di dalam negeri serta memperluas kerja sama internasional, AS dapat memainkan peran penting dalam mempercepat transisi ke ekonomi rendah karbon dan memperkuat upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.<sup>14</sup>

**Penelitian ketiga** jurnal penelitian oleh *Center for Climate and Energy Solutions* yang berjudul *The Paris Agreement after Trump: Implications for*

---

<sup>13</sup> PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. (2021). *The US Rejoining the Paris Agreement: Economic and Environmental Implications*. Bilthoven, The Netherlands: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency

<sup>14</sup> German Institute for International and Security Affairs. (2021). *The Re-entry of the United States into the Paris Agreement: Opportunities for Climate Diplomacy and Leadership*. Berlin, Germany: German Institute for International and Security Affairs.

*Global Climate Governance*, bahwa keputusan Presiden Trump untuk menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris dapat mengancam stabilitas dan keberhasilan perjanjian tersebut. Namun, meskipun keputusan AS untuk keluar dari perjanjian tersebut, negara-negara lain dan aktor non-pemerintah terus berkomitmen untuk mengurangi emisi dan memperkuat tindakan iklim mereka. Dalam jangka panjang, keberhasilan Perjanjian Iklim Paris akan bergantung pada upaya bersama dari semua pihak untuk memperkuat aksi iklim dan meningkatkan ambisi mereka.<sup>15</sup>

Ketiga penelitian diatas membahas bagaimana kondisi AS setelah kembali masuk kedalam perjanjian Iklim Paris sehingga memudahkan peneliti menganalisa tindakan dan kondisi setelah kondisi AS setelah kembali masuk kedalam perjanjian Iklim.

#### **1.4.3 Perdebatan Pro dan Kontra terhadap keluarnya AS dari Perjanjian Iklim Paris**

**Peneliti Pertama** Jurnal artikel yang di tulis oleh **Johannes Urpelainen** dan **Thijs Van De Graaf** yang berjudul **United States Non-Cooperation and Paris Agreement** , menyatakan bahwa pembatalan Kerjasama Amerika dengan Perjanjian Paris sendiri di takutkan dapat membawa dampak yang krusial dan belum pernah terpikir sebelumnya, dengan memutus Kerjasama pada perjanjian paris sendiri memiliki potensi yang cukup fatal meskipun dampak dari penarikan Amerika Serikat masih belum secara signifikan berdampak pada emisi di Amerika. Pada jurnal ini penulis menyatakan bahwa Uni Eropa , China ataupun India di

---

<sup>15</sup> Center for Climate and Energy Solutions. (2018). *The Paris Agreement after Trump: Implications for Global Climate Governance*. Arlington, VA: Center for Climate and Energy Solutions.

harapkan mampu untuk menggantikan kepemimpinan Amerika dalam hal ini mengenai perjanjian Paris<sup>16</sup>

**Peneliti kedua** Jurnal artikel yang di tulis oleh **Zhang Hai-Bin, Dai Han Cheng** dan **Wang Wen Tao** dengan judul *U.S. Withdrawal from the Paris Aggrement : Reasons, Impacts and China Response*. Dalam penelitian ini di jelaskan mengapa Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pada saat itu menjabat memutuskan untuk menyatakan sikap Kontra terhadap perjanjian Paris ini, lantaran Donald trump sendiri memiliki kepercayaan bahwa perjanjian paris ini sendiri akan memberikan dampak yang merugikan terhadap kepentingan Amerika Serikat dalam sektor ekonomi serta merugikan kedaulatan dari Amerika Serikat . Trump sendiri mengatakan bahwa perjanjian paris ini akan memberikan beban terhadap sektor perekonomian yang timpang atau sangat tidak adil kepada Amerika Serikat serta dapat menghambat industry energi tradisional dan mempersedikit lapangan pekerjaan. Selain pernyataan tersebut, Trump juga memiliki sikap skeptis terhadap dampak yang akan di timbulkan dari perubahan iklim serta memiliki anggapan bahwa Upaya mitigasi yang di lakukan perjanjian paris akan mengorbankan atau menumbalkan pertumbuhan ekonomi dari Amerika serikat itu sendiri<sup>17</sup>

**Peneliti Ketiga** Jurnal Artikel yang di tulis oleh **Beryl Rifqi Alhadi** Dengan judul **Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Keluar dari**

---

<sup>16</sup> Urpelainen, J., & de Graaf, T. Van. (2018). United States non-cooperation and the Paris agreement. *Climate Policy*, 18(7), 839–851. <https://doi.org/10.1080/14693062.2017.1406843>

<sup>17</sup> Zhang, H. Bin, Dai, H. C., Lai, H. X., & Wang, W. T. (2017). U.S. withdrawal from the Paris Agreement: Reasons, impacts, and China's response. *Advances in Climate Change Research*, 8(4), 220–225. <https://doi.org/10.1016/j.accre.2017.09.002>

**Paris Agreement (COP-21)**, Pada penelitian ini memaparkan bahwa keputusan dari Donald Trump untuk keluar dari kesepakatan Paris mendapat pengaruh oleh keyakinan pribadinya, pengaruh keuangan dari perusahaan minyak, gas serta batu bara, kemudian dukungan dari partai Republik. Industri minyak dan gas memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam politik Amerika Serikat, dengan menggunakan sumber daya keuangan mereka untuk mendanai kampanye serta mempengaruhi kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Keputusan Trump untuk keluar dari perjanjian Paris sendiri bertentangan dengan dukungan mayoritas publik yang ingin tetap berada dalam kesepakatan tersebut<sup>18</sup>.

**Peneliti keempat** jurnal artikel yang di tulis oleh **Hazazi Ridho Subarkah, Yanyan M. Yani, Taufik Hidayat** dengan Judul **Pengaruh Amerika Serikat Keluar Dari Paris Agreement 2015 Terhadap Keamanan Nasional Amerika Serikat**, Penulis pada jurnal ini meyakini bahwa dengan keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian paris memiliki konsekuensi atau dampak terancamnya keamanan Amerika Serikat. Dalam keinginan Trump sendiri beranggapan bahwa jika tetap bergabung kedalam perjanjian paris akan menyebabkan dampak yang buruk terhadap ekonominya, namun dengan keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian Paris sendiri akan menyebabkan dampak buruk dan negatif terhadap perubahan iklim dan Amerika sendiri tentunya di rasa tidak perlu untuk keluar dari perjanjian paris.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Beryl, O. :, & Alhadi, R. (2018). KEBIJAKAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT DONALD TRUMP KELUAR DARI PARIS AGREEMENT (COP-21). In *JOM FISIP* (Vol. 5). <https://www.theguardian.com/environment/201>

<sup>19</sup> Hazazi Ridho Subarkah, Yanyan M. Yani, & Taufik Hidayat. (2019). *PENGARUH AMERIKA SERIKAT KELUAR DARI PARIS AGREEMENT 2015 TERHADAP KEAMANAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT*. 20, 2–16.

Dari keempat peneliti tersebut menuai pro dan kontra terhadap sikap dari presiden Donad Trump menarik diri dari perjanjian Paris. Peneliti pertama dan keempat menyatakan sikap menolak Amerika untuk henggang dari perjanjian paris atau kontra terhadap keputusan Trump karena di nilai dapat memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan, namun Peneliti kedua dan keempat menyatakan setuju akan keputusan Donald Trump untuk keluar dan menarik diri dari perjanjian Paris

## **1.5 Kerangka Teoritis**

### **1.5.1 Rational Actor Model (RAM)**

Graham T. Allison sendiri mendefinisikan kebijakan luar negeri kedalam tiga model, yang Pertama ialah *The Rational Actor Model*, model ini mengasumsikan bahwa Keputusan dibuat oleh satu entitas Tunggal (seperti negara) yang bertindak secara rasional untuk mencapai tujuannya. Kedua ialah *Organizational Process*, adalah proses yang mencakup berbagai aspek dengan serangkaian Langkah atau prosedur yang akan membantu dalam pengelolaan sumber dan pencapaian yang ingin dituju. Ketiga ialah *Bureaucratic Politics*, Model ini menunjukkan bahwa keputusan tidak hanya diambil oleh satu aktor tunggal atau berdasarkan analisis rasional semata, melainkan merupakan hasil dari interaksi dan kompromi antara individu dan kelompok yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam birokrasi. Tiga model tersebut merupakan model yang di gunakan oleh Allison dalam menjelaskan suatu dinamika yang terjadi pada

suatu negara. Dari ketiga model tersebut penulis memilih model Rational Actor Model dikarenakan Rational Actor Model berfokus pada keputusan rasional. Dalam penelitian ini, keputusan Donald Trump untuk menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris dan keputusan Joe Biden untuk kembali bergabung dapat dianalisis sebagai tindakan rasional yang didorong oleh perhitungan politik dan ekonomi masing-masing presiden. Sedangkan Organizational Process Model menekankan bahwa kebijakan luar negeri merupakan hasil dari prosedur dan rutinitas yang dijalankan oleh organisasi birokrasi pemerintah. Keputusan dihasilkan dari proses dan SOP yang sudah ada, bukan dari pertimbangan rasional individu tunggal. Sehingga Organizational Process Model kurang cocok untuk penelitian ini dikarenakan fokus utamanya adalah pada keputusan spesifik dari presiden yang menunjukkan perubahan kebijakan yang signifikan. Organizational Process Model lebih menekankan pada prosedur rutin dan kurang menekankan pada keputusan individual presiden. Model ini cenderung tidak dapat menjelaskan perubahan kebijakan yang drastis dan cepat seperti yang terjadi antara pemerintahan Trump dan Biden. Dan yang terakhir Bureaucratic Politics Model menyatakan bahwa kebijakan luar negeri merupakan hasil dari negosiasi dan kompromi antara berbagai aktor dan lembaga dengan kepentingan yang berbeda dalam pemerintah. Keputusan adalah produk tarik-menarik antara birokrat dan pemimpin dari berbagai lembaga yang terlibat. Sehingga, Bureaucratic Politics Model kurang sesuai dengan penelitian ini karena fokus utama adalah pada perubahan

kebijakan yang didorong oleh keputusan presiden, bukan hasil dari kompromi antara berbagai birokrat. Model ini lebih relevan untuk kasus-kasus di mana keputusan kebijakan merupakan hasil dari konflik dan negosiasi internal, bukan perubahan kebijakan yang dipicu oleh perubahan administrasi presiden.<sup>20</sup>

*The Rational Actor Model*, model ini sendiri melihat sebuah negara sebagai satu kesatuan serta tindakan pemerintah dalam setiap kebijakan yang di buat merupakan pilihan yang rasional. Pemerintahan sendiri sebagai pembuat kebijakan di definisikan rasional dalam setiap pengambilan suatu kebijakan. Pilihan rasional pemerintah dalam *Basic Unit Analysis Model 1* memaparkan bahwa setiap *Action* yang di lakukan atau di jalankan oleh suatu pemerintahan akan selalu diorientasikan terhadap upaya upaya yang bertujuan untuk memaksimalkan suatu tujuan strategis pada suatu negara. Hal tersebut kemudian dapat di tarik kesimpulan bahwa tindakan suatu negara bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat normative, melainkan negara negara yang mengambil suatu langkah secara empiris yang di dasari oleh keputusan atau kebijakan luar negeri yang di ambil bukan dari sebuah asumsi belaka.

Menurut model ini, perhitungan untung-rugi dan pertimbangan rasional/intelektual digunakan untuk membuat keputusan yang bijaksana, matang, dan sesuai. Model ini menunjukkan bagaimana pembuat keputusan

---

<sup>20</sup> Allison, G. T., & Halperin, M. H. (1972). *Bureaucratic Politics: A Paradigm and Some Policy Implications*. (Hal 5-8)



menggunakan berbagai kebijakan untuk mendapatkan hasil terbaik. Salah satu asumsi dasar dari model aktor rasional adalah bahwa negara-negara dapat dianggap sebagai aktor yang melakukan kalkulasi rasional di kancah politik global untuk memaksimalkan pencapaian tujuan mereka. Berbagai tindakan pemerintah diperiksa dengan asumsi bahwa mereka mempertimbangkan semua opsi mereka dan membuat pilihan yang logis untuk memaksimalkan pendapatan mereka. Selama proses pembuatan kebijakan, pemerintah harus memilih antara berbagai pilihan, dan setiap pilihan memiliki efek. Negara akan bertindak secara rasional dan memilih alternatif kebijakan yang memiliki hasil yang paling menguntungkan untuk mencapai tujuan dan tujuan.<sup>21</sup>

Model ini juga menekankan dalam *Organizing Concepts* bahwa identifikasi dari masalah dalam setiap proses pengambilan suatu kebijakan harus melalui proses Panjang yakni proses kognitif, yang merupakan proses ilmiah yang dilakukan dalam menjelaskan atau mengkaji sebuah permasalahan yang nantinya agar dapat memiliki suatu ukuran rasional yang objektif bahwa hal tersebut sudah tepat atau tidak.<sup>22</sup> Tindakan pemerintah nasional dalam setiap pengambilan suatu kebijakan yang rasional akan selalu dilihat sebagai sebuah upaya pemaksimalan nilai dari tindakan yang akan berdampak terhadap kepentingan suatu negara. Kemudian dalam

---

<sup>21</sup> Putri, A. S. (2024). Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Selandia Baru Penerapan Kebijakan “Strategi Eliminasi” untuk Menekan Laju Angka Covid-19. *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

<sup>22</sup> Biden, J. (2020, September 14). The Biden Plan to Build a Modern, Sustainable Infrastructure and an Equitable Clean Energy Future. Retrieved from <https://joebiden.com/clean-energy/> (30/6/2023 00.28)

model pertama ini juga memaparkan mengenai asumsi terkait resiko terhadap segala tindakan yang di lakukan oleh pemerintah. Ketika resiko rendah maka pemerintah cenderung melakukan tindakan, namun jika di rasa resiko di anggap terlalu tinggi maka pemerintah akan cenderung sedikit melakukan tindakan. Allison juga mengulas tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan model aktor rasional untuk memastikan keputusan yang diambil sejalan dengan tujuan nasional dengan nilai yang optimal.

Tahapan-tahapan rational actor model yang dijelaskan oleh Graham T. Allison dilakukan melalui empat tahapan, yang mencakup<sup>23</sup>:

1. *Problem recognition and definition*

Pengenalan dan penentuan masalah merupakan langkah pertama dalam pembuatan kebijakan oleh suatu negara sebagai tanggapan terhadap situasi yang dihadapinya. Situasi ini dapat berupa ancaman atau peluang yang muncul dalam konteks internasional, yang kemudian mendorong negara untuk mengambil langkah-langkah kebijakan tertentu. Proses ini merupakan upaya negara untuk secara objektif mengidentifikasi dan menetapkan sifat masalah yang dihadapi.

2. *Goal Selection*

Perlindungan dan kepentingan nasional adalah fokus utama sebuah negara dalam mempertahankan keberadaannya di tingkat internasional. Pada tahap ini, negara akan mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai

---

<sup>23</sup> Allison, Graham T. 1971. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. New York: Longman. New York (Hal 23-56)

berdasarkan pada kepentingan dan keamanan nasionalnya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga eksistensi dan kepentingan negara di dunia internasional.

### 3. *Identification of Alternative*

Dalam langkah ini, terdapat dua aspek penting yaitu keputusan dan dampaknya, yang merupakan kelanjutan dari langkah-langkah sebelumnya. Negara akan mengidentifikasi alternatif-alternatif yang relevan dalam menangani masalah yang dihadapi. Setiap alternatif tersebut akan menghasilkan berbagai pilihan yang dapat diambil. Kemudian, setiap pilihan akan memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Dalam tahap ini, negara akan menggunakan rasionalitas dengan melakukan evaluasi cost and benefit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, negara akan mengevaluasi potensi untung dan rugi dari setiap pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut.

### 4. *Choice*

Langkah terakhir dalam perilaku intelektual negara adalah memilih secara rasional dengan tujuan mengoptimalkan hasil, yang dikenal sebagai value maximizing. Ini melibatkan evaluasi aspek-aspek yang terkait dengan negara, termasuk nilai dan tujuan, pilihan alternatif yang tersedia, estimasi konsekuensi dari setiap alternatif, serta interpretasi dari konsekuensi tersebut. Negara, sebagai aktor rasional, akan memilih opsi yang memiliki kerugian terendah sehingga dapat mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan kata lain, negara akan memilih pilihan yang dianggap memberikan

hasil terbaik dengan risiko kerugian yang minimal untuk mencapai tujuan nasionalnya.

Dalam penerapan dari 4 tahapan Allison tersebut 1. Amerika Serikat (AS) memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kebijakan iklim global. Perjanjian Iklim Paris, yang disetujui pada tahun 2015, bertujuan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim global dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, di tingkat nasional AS, ada perubahan yang signifikan dalam pendekatan terhadap perjanjian ini ketika kepemimpinan pemerintahan berubah dari Presiden Barack Obama ke Presiden Donald Trump pada tahun 2017. Penentu masalah utamanya adalah pergantian pemerintahan tersebut. Presiden Trump secara terbuka menentang Perjanjian Paris dan menyatakan niatnya untuk menarik AS dari kesepakatan tersebut. Pada bulan Juni 2017, keputusan resmi untuk menarik diri dari perjanjian ini diumumkan, menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran di tingkat internasional tentang komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim. Langkah tersebut berdampak pada lingkungan karena mengurangi upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat pemanasan global. Ini menimbulkan keprihatinan dari komunitas ilmiah dan lingkungan atas dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan manusia di seluruh dunia. Tindakan AS juga memengaruhi hubungan diplomatiknya dengan negara lain di dunia. Beberapa negara bereaksi dengan kekecewaan dan menegaskan komitmen mereka terhadap Perjanjian Paris, sementara yang lain mungkin merasa lega namun tetap

khawatir akan dampaknya terhadap kerja sama global dalam mengatasi perubahan iklim. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan dampak besar dari keputusan AS terhadap isu perubahan iklim global.<sup>24</sup>

2. Perlindungan dan kepentingan nasional Amerika Serikat dalam konteks keamanan energi sangat relevan dengan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Perjanjian Paris memiliki dampak langsung terhadap kebijakan energi AS karena menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca, yang dapat mempengaruhi penggunaan dan produksi sumber daya energi fosil. Pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris dapat mendorong AS untuk mengurangi ketergantungannya pada energi fosil, seperti minyak, gas, dan batu bara. Hal ini dapat mengarah pada diversifikasi sumber energi negara, termasuk peningkatan investasi dalam energi terbarukan dan teknologi bersih. Meskipun hal ini dapat mendukung langkah-langkah menuju keberlanjutan energi, namun juga dapat menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas pasokan energi tradisional yang memainkan peran kunci dalam keamanan energi AS.<sup>25</sup>

3. Perubahan kebijakan yang terjadi karena keputusan AS untuk keluar dari Perjanjian Paris telah menciptakan dampak yang signifikan di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, pemerintahan Trump telah mengurangi atau menghapus sejumlah regulasi lingkungan yang sebelumnya diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya untuk

---

<sup>24</sup> (UNFCCC, 2024.) The Paris Agreement Related news Related Documents Related links What is the Paris Agreement?

<sup>25</sup> (EESI, 2017) THE NATIONAL SECURITY IMPACTS OF CLIMATE CHANGE.

mengurangi emisi gas rumah kaca. Langkah ini mencerminkan pergeseran dalam pendekatan kebijakan iklim AS. Di sisi lain, keputusan AS untuk menarik diri dari Perjanjian Paris juga telah menimbulkan kerugian diplomatis dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Tindakan ini mengirimkan sinyal bahwa AS tidak lagi memegang komitmen untuk memimpin dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Dampaknya adalah kemungkinan berkurangnya kepercayaan dan kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan lingkungan global ini.<sup>26</sup>

4. Revisi kebijakan iklim merupakan opsi bagi AS untuk tetap terlibat dalam Perjanjian Paris sambil mengadopsi langkah-langkah baru dalam menangani kekhawatiran terkait ekonomi dan keamanan energi. Hal ini dapat melibatkan pengembangan strategi baru yang mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan teknologi bersih, sambil tetap mempertahankan stabilitas pasokan energi dari sumber-sumber tradisional seperti minyak dan gas. Dengan kata lain, AS dapat menyesuaikan kebijakan iklimnya untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keamanan energi dengan komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam implementasi teori kebijakan luar negeri Graham T. Allison *The Rational Actor Model* nantinya akan menjadi alat analisa yang akan dapat memaparkan atau menjelaskan mengenai rumusan masalah pada penelitian ini yakni "Bagaimana perubahan kebijakan luar negeri Amerika

---

<sup>26</sup> (John Chusman & Zahra Hirji, 2017)

Serikat terkait perjanjian iklim Paris pada terpilihnya Joe Biden sebagai presiden ? ”

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif eksplanatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Peneliti menggunakan peneliti sebagai alat utama, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi (gabungan), dan analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya daripada generalisasi.<sup>27</sup> Penelitian eksplanatif meneliti bagaimana satu variabel mempengaruhi atau berhubungan dengan variabel lain dan menjelaskan mengapa gejala tertentu terjadi.<sup>28</sup> Penelitian kualitatif eksplanatif pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana terpilihnya Joe Biden mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait Perjanjian Iklim Paris.

### **1.6.2 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah atribut, sifat, atau nilai dari individu, objek, atau kegiatan yang bervariasi dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta disimpulkan. Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya

---

<sup>27</sup> Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

<sup>28</sup> Bungin, B. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo: Depok.

variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel x adalah rasionalisasi pemerintah Amerika Serikat. Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Pada penelitian ini, variabel y adalah perubahan kebijakan Joe Biden terkait Perjanjian Iklim Paris

### **1.6.3 Level Analisa**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif dengan judul Analisa Perubahan Kebijakan Amerika Serikat Terkait Perjanjian Iklim Paris. Dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait Perjanjian Iklim Paris pada masa pemerintahan Joe Biden. Penelitian ini menekankan pada analisis bagaimana perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dipengaruhi oleh Rasionalisasi pemerintah Amerika Serikat, dengan fokus pada kembalinya Amerika Serikat ke dalam Perjanjian Iklim Paris dan implikasi dari keputusan tersebut. Penentu unit analisis dari penelitian ini adalah aspek-aspek perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait dengan Perjanjian Iklim Paris di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Penelitian ini menggunakan model aktor rasional untuk menganalisis bagaimana keputusan kebijakan diambil berdasarkan perhitungan untung-rugi dan pertimbangan rasional guna memaksimalkan tujuan strategis Amerika Serikat. Dalam konteks ini, unit analisis mencakup tindakan-tindakan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Biden untuk kembali meratifikasi Paris Agreement dan mengimplementasikan kebijakan energi



bersih, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap lingkungan, ekonomi, dan keamanan nasional Amerika Serikat. Unit eksplanatif dalam penelitian ini adalah "Bagaimana rasionalisasi pemerintah Amerika Serikat mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait Perjanjian Iklim Paris." Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara rasionalisasi pemerintah Amerika Serikat (Variabel x) dan perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait Perjanjian Iklim Paris (Variabel y).

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik eksplanatif secara kualitatif. Metode ini mencakup tiga teknik utama yaitu reduksi data, representasi data dan inferensi. Reduksi data dilakukan dengan mengagregasi data mentah menjadi data yang lebih pekat. Informasi disajikan dengan mengatur dan menampilkan informasi secara sistematis. Kesimpulan dibuat dengan menafsirkan dan menganalisis data atau objek yang diteliti berdasarkan kerangka teori yang ada.<sup>29</sup>

#### **1.6.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik studi pustaka adalah teknik yang diterapkan dalam memperoleh informasi dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, dan sumber lain yang terdapat di media elektronik. Teknik ini

---

<sup>29</sup> Bungin, B. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo: Depok.

diterapkan dengan cara membaca, menyimpan dan mengolah informasi dari sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, teknik penelitian kepustakaan juga dapat digunakan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang ada, kemudian menganalisis dan mensintesis informasi tersebut untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Teknik penelitian sastra sangat cocok untuk penelitian di mana mempelajari fenomena atau peristiwa masa lalu dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang teori atau konsep tertentu yang terkait dengan penelitian.<sup>30</sup>

## **1.6.6 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.6.6.1 Batasan Materi**

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka peneliti membatasi pembahasan penelitian ini pada perubahan kebijakan luar negeri tentang perjanjian Iklim Paris pada masa keluarnya Amerika Serikat pada Perjanjian Iklim Paris sampai dengan pada kembalinya Amerika Serikat pada Perjanjian Iklim Paris pada masa kepemimpinan Joe Biden.

### **1.6.6.2 Batasan Waktu**

Batasan waktu penelitian ini adalah dimulai dari masa kampanye Joe Biden 2019-2020 dan masa setelah AS kembali masuk kedalam perjanjian Iklim Paris pada tahun 2021.

---

<sup>30</sup> Susilowati, E. (2020). *Metode Studi Pustaka: Sebuah Kajian Teoritis*. Jurnal Teknosastik, 18(1), 28-37.

## 1.7 Argumen Pokok

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat berkembang terkait dengan Perjanjian Iklim Paris setelah terpilihnya Joe Biden sebagai presiden menjadi *Problem recognition and definition* dalam pengimplementasian teori *Rational Actor Model*. Dengan terpilihnya Presiden Joe Biden, AS telah memutuskan untuk kembali bergabung dengan kesepakatan iklim Paris, menandai perubahan politik yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa isu perubahan iklim memegang peran penting dalam dinamika politik AS. Joe Biden sebagai presiden terpilih AS berusaha untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dan kepentingan nasional Amerika Serikat dengan memperkuat komitmen terhadap mitigasi perubahan iklim global. Dalam konteks ini, fokus utama negara adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan penduduknya dengan menghadapi tantangan perubahan iklim yang termasuk tujuan atau *Goal Selection*. Lalu *identification of Alternative* dalam kasus ini ialah Setelah dilantik sebagai Presiden, Biden segera bertindak dalam merumuskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya dalam hal lingkungan. Biden berjanji untuk bertindak cepat dalam upaya penanggulangan perubahan iklim, dan kerja sama yang intensif dengan ilmuwan di berbagai sektor pemerintahan menandai awal dari pembalikan kebijakan yang signifikan setelah empat tahun di mana aturan lingkungan di Amerika Serikat melemah selama pemerintahan Donald Trump yang mendukung industri bahan bakar fosil. Langkah terakhir yakni *Choice*. Dalam konteks analisis perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait Perjanjian Iklim Paris pada masa pemerintahan Joe Biden, proses pemilihan ini sangat penting. Sebagai aktor

rasional, Amerika Serikat akan memilih opsi yang dianggap memberikan hasil terbaik dengan risiko kerugian yang minimal untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini, pemilihan yang rasional akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak ekonomi, lingkungan, keamanan nasional, serta citra internasional.

Oleh karena fakta tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perubahan kebijakan luar negeri AS terkait Perjanjian Paris setelah pemilihan Presiden Joe Biden, menggunakan metode model aktor rasional dan analisis kualitatif.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Bab I	<b>Pendahuluan</b>
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
	1.3.1 Tujuan Penelitian
	1.3.2 Manfaat Penelitian
	1.4 Penelitian Terdahulu
	1.4.1 AS Melakukan Penarikan Diri Dari Perjanjian Iklim Paris
	1.4.2 AS Kembali Bergabung Kedalam Perjanjian Iklim Paris
	1.5 Kerangka Konseptual
	1.5.1 Rational Actor Model (RAM)
	1.6 Metode Penelitian

	1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan
Bab II	<b>Dinamika Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Paris Agreement</b>
	2.1 Konteks Kebijakan Luar Negeri AS pada Paris Agreement
	2.2 Kebijakan Luar Negeri AS Terkait Paris Agreement Pada Masa Pemerintahan Donald Trump
	2.3 Kebijakan Luar Negeri AS Terkait Paris Agreement Pada Masa Joe Biden
	2.4 Dampak dan Respons Terhadap Penarikan AS dari Paris Agreement
Bab III	<b>Analisa Perubahan Kebijakan</b>
	3.1. Perbedaan Pandangan terhadap <i>Paris Agreement</i>
	3.2. Tujuan Amerika Serikat
	3.3. Opsi Kebijakan Oleh Presiden Joe Biden
	3.4 Pilihan Kebijakan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Presiden Joe Biden
Bab IV	<b>Penutup</b>
	4.1 Kesimpulan
	4.2 Saran